

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TERKAIT BBM BERSUBSIDI BAGI NELAYAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Oleh

Adelaide Charlotte Sampelan¹, Goinpeace Handerson Tumbel², Devie S.R. Siwij³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

E-mail: ¹aidecharlotte@gmail.com, ²goinpeacetumbel@unima.ac.id,

³deviesiwij@unima.ac.id

Article History:

Received: 21-10-2024

Revised: 28-10-2024

Accepted: 24-11-2024

Keywords:

Implementasi, Kebijakan,
Bahan Bakar, Minyak (BBM)
Bersubsidi.

Abstract: Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), display data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pertama, Standar Operasional Prosedur (SPO) belum menggambarkan secara jelas. Kedua, penyaluran BBM bersubsidi masih sering tidak tepat sasaran, karena masih terdapat orang yang tidak berhak yang diberikan kesempatan untuk memperoleh BBM bersubsidi. Ketiga, kurangnya alokasi kuota BBM bersubsidi telah mengakibatkan kebutuhan nelayan saat melaut tidak terpenuhi. Keempat, dari dua SPBN yang tersedia, hanya satu SPBN yang beroperasi. Melalui permasalahan yang ditemukan tersebut, maka dapat terlihat bahwa keberpihakan dan pengawasan dari pemerintah daerah belum optimal. Dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara, belum terlaksana secara baik. Oleh karena itu, diperlukan keberpihakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada, termasuk penguatan dalam pengawasan.

PENDAHULUAN

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap kelompok nelayan kecil yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan ekonomi pesisir. Kebijakan ini bertujuan membantu nelayan menghadapi ketidakpastian cuaca, fluktuasi harga hasil laut, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Melalui subsidi BBM, pemerintah memastikan keberlanjutan aktivitas nelayan kecil, menjaga harga ikan tetap terjangkau, dan memperkuat ekonomi lokal di wilayah pesisir.

Subsidi BBM juga mencerminkan perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan budaya maritim. Nelayan tradisional cenderung memiliki pendekatan yang lebih lestari dalam menangkap ikan, dibandingkan dengan industri perikanan skala besar. Dukungan subsidi ini diarahkan untuk mendorong praktik yang ramah lingkungan sekaligus mempromosikan kemandirian ekonomi lokal. Kebijakan ini juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi pesisir dan memberikan pengakuan terhadap kontribusi nelayan kecil dalam perekonomian nasional.

Untuk melindungi hak nelayan, pemerintah menerapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, dan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan mengatur distribusi BBM bersubsidi, memastikan penggunaan yang tepat sasaran, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Peraturan-peraturan tersebut berfungsi saling melengkapi dalam mengawasi penyaluran subsidi, mengurangi penyalahgunaan, dan menjamin akses yang adil bagi nelayan yang berhak menerimanya.

Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa Tenggara, adalah wilayah yang bergantung pada sektor perikanan sebagai pilar utama ekonomi daerah. Mayoritas nelayan di wilayah ini sangat membutuhkan BBM bersubsidi untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Data menunjukkan bahwa terdapat 20.187 kapal di Sulawesi Utara, dengan 1.746 nelayan yang terdaftar dalam Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kendati demikian, pelaksanaan subsidi BBM sering menghadapi berbagai masalah terkait distribusi dan aksesibilitas.

Masalah yang dihadapi nelayan meliputi ketidak-tepatan sasaran subsidi, ketidaksesuaian kuota distribusi, dan kompleksitas prosedur administratif dalam memperoleh BBM bersubsidi. Lemahnya pengawasan dan transparansi, serta kurangnya sosialisasi, turut memperburuk situasi ini. Akibatnya, banyak nelayan yang tidak mendapatkan BBM bersubsidi meskipun memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 memberikan kerangka kebijakan untuk memastikan BBM bersubsidi didistribusikan dengan tepat kepada kelompok yang membutuhkan, seperti nelayan kecil. Implementasi kebijakan ini mencakup pengawasan terhadap badan usaha yang menyalurkan BBM, pelaporan berkala, dan pengaturan sasaran penerima subsidi. Namun, penerapannya masih memerlukan perbaikan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi nelayan di lapangan.

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan ini diterapkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait BBM bersubsidi di Kabupaten Minahasa Tenggara dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai realitas kebijakan subsidi BBM bagi nelayan dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam menghadapi masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan tidak hanya melibatkan keputusan untuk melakukan suatu tindakan tetapi juga keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, karena kedua pilihan tersebut dapat membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Kebijakan publik mencakup hubungan antara pemerintah dan lingkungannya, di mana tindakan yang diambil mencerminkan upaya pemerintah untuk mengelola berbagai isu publik melalui pengalokasian nilai-nilai yang dianggap penting bagi masyarakat.

Kebijakan publik memiliki karakteristik yang kompleks, melibatkan proses yang berkelanjutan dan berlangsung dalam konteks intra dan antar organisasi. Kebijakan ini mencakup perilaku, harapan, serta tujuan eksplisit maupun implisit yang ingin dicapai. Selain itu, kebijakan publik dirancang untuk menghasilkan hasil akhir tertentu dan melibatkan peran kunci lembaga pemerintah dalam pelaksanaannya. Elemen-elemen seperti tujuan, proses, hubungan antar organisasi, serta pengaruh terhadap masyarakat menjadi bagian penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah bentuk alokasi nilai-nilai yang dilakukan oleh otoritas dalam sistem politik. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik mencerminkan pilihan yang diambil untuk memberikan dampak tertentu bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak hanya berupa pernyataan niat atau keinginan, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata yang memiliki konsekuensi langsung terhadap masyarakat luas, baik melalui keputusan untuk bertindak maupun untuk tidak bertindak.

Teori Kebijakan Publik

Dalam studi kebijakan publik, berbagai teori dikembangkan untuk memahami proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Teori-teori ini mencakup berbagai perspektif, mulai dari pendekatan sistem yang melihat kebijakan sebagai hasil interaksi komponen dalam sistem politik hingga teori pilihan rasional yang menyoroti keputusan berdasarkan perhitungan keuntungan pribadi. Ada pula teori jaringan kebijakan yang fokus pada hubungan antaraktor, teori tahap kebijakan yang merinci proses menjadi tahapan sistematis, serta teori pembelajaran kebijakan yang menekankan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Selain itu, teori seperti birokrasi, pilihan publik, multiple streams, advokasi koalisi, dan institusional memberikan kerangka kerja tambahan untuk menganalisis berbagai aspek dalam kebijakan publik.

Proses kebijakan publik melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk memecahkan masalah secara sistematis. Tahap pertama adalah penyusunan agenda, di mana

isu-isu publik bersaing untuk masuk ke dalam agenda pembuat kebijakan. Selanjutnya adalah tahap formulasi kebijakan, di mana berbagai alternatif solusi dianalisis untuk dipilih sebagai kebijakan terbaik. Proses ini melibatkan perumusan masalah dan penyusunan berbagai opsi kebijakan yang bersaing untuk mendapatkan prioritas.

Tahap adopsi kebijakan melibatkan pengambilan keputusan akhir dari berbagai alternatif yang diusulkan. Kebijakan yang telah diadopsi kemudian masuk ke tahap implementasi, di mana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan administrasi dan agen pemerintah. Tahap ini memobilisasi sumber daya manusia dan finansial untuk menerapkan kebijakan secara efektif. Namun, dalam implementasi, sering kali muncul tantangan berupa konflik kepentingan atau kurangnya dukungan dari pelaksana kebijakan.

Tahap evaluasi adalah langkah penting untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak yang diharapkan. Dengan menggunakan kriteria dan ukuran yang jelas, evaluasi membantu menentukan apakah kebijakan tersebut perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Proses ini memberikan masukan penting untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap esensial dalam siklus kebijakan publik yang dimulai setelah undang-undang atau kebijakan disahkan. Pada tahap ini, berbagai aktor, organisasi, dan teknik bekerja sama untuk menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi tindakan nyata. Implementasi mencakup proses, keluaran, dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan, dengan fokus pada pencapaian sasaran dan perubahan yang diinginkan. Proses ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk mengorganisasikan sumber daya dan menyusun langkah-langkah yang konkret guna menjalankan kebijakan dengan efektif.

Implementasi kebijakan melibatkan berbagai komponen, termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik memastikan pelaksana memahami tujuan, kelompok sasaran, dan langkah implementasi secara jelas dan konsisten. Sumber daya mencakup dukungan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, serta informasi yang relevan. Disposisi pelaksana yang mencakup kejujuran, komitmen, dan kompetensi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi. Struktur birokrasi yang sederhana dan efisien diperlukan untuk memastikan fleksibilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III menyoroti empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi memastikan informasi kebijakan disampaikan secara jelas dan konsisten. Sumber daya, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun tenaga kerja, merupakan pendukung utama keberhasilan kebijakan. Disposisi pelaksana, seperti kejujuran dan komitmen, menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan, sementara struktur birokrasi yang sederhana mencegah hambatan administratif yang dapat memperlambat proses implementasi.

Implementasi kebijakan sering menghadapi tantangan, termasuk kurangnya sumber daya, birokrasi yang rumit, dan perbedaan interpretasi di antara pelaksana. Selain itu, struktur birokrasi yang terlalu panjang dapat melemahkan pengawasan dan menciptakan

prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antaraktor, alokasi sumber daya yang memadai, serta mekanisme komunikasi dan pengawasan yang efektif. Dengan mengatasi tantangan ini, kebijakan dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan memberikan dampak yang optimal.

Nelayan

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas penangkapan ikan. Mereka tinggal di dekat pantai, menggunakan perahu, pancing, jaring, atau alat tradisional lainnya untuk menangkap ikan. Masyarakat nelayan umumnya memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah, dengan tingkat pendidikan, sarana, dan prasarana yang masih terbatas. Lingkungan mereka sering terancam oleh kerusakan habitat, pencemaran, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Masyarakat nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan kepemilikan modal. Pertama, nelayan juragan adalah mereka yang memiliki perahu dan alat tangkap, sering mempekerjakan nelayan pekerja untuk membantu menangkap ikan. Kedua, nelayan pekerja adalah mereka yang tidak memiliki alat tangkap sendiri dan bergantung pada juragan untuk bekerja. Ketiga, nelayan pemilik adalah nelayan miskin yang hanya memiliki peralatan sederhana untuk kebutuhan pribadi. Komunitas nelayan dikenal dengan kehidupan gotong royong dan solidaritas, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan social.

Komunitas nelayan tidak hanya berkontribusi pada sektor perikanan tetapi juga membentuk budaya maritim yang kuat. Kehidupan mereka yang sederhana, bergantung pada kearifan lokal dan keterampilan tradisional, menunjukkan daya juang yang tinggi dalam menghadapi kerasnya kehidupan laut. Dengan karakteristik unik ini, nelayan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mendukung perekonomian lokal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan subsidi BBM bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini dilakukan di lokasi yang relevan seperti pelabuhan nelayan dan tempat pengisian BBM, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, Pertamina, dan nelayan. Fokus penelitian diarahkan pada aspek-aspek utama seperti prosedur penyaluran, ketepatan sasaran penerima, ketersediaan kuota BBM, dan keberadaan SPBN sebagai penyalur.

Peneliti sendiri menjadi instrumen utama dalam penelitian ini, memanfaatkan pengalamannya di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Utara yang memiliki hubungan langsung dengan kebijakan BBM subsidi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang mencakup regulasi, laporan keuangan, dan data statistik. Informasi diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive, mencakup pihak-pihak yang relevan seperti pejabat pemerintah, nelayan, dan perwakilan organisasi terkait.

Situasi sosial di Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi fokus pengamatan, mencakup aktivitas harian nelayan, proses administrasi penyaluran subsidi, dan interaksi dengan pihak

penyalur BBM. Observasi dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, memastikan data yang akurat dan mendalam. Aktivitas nelayan dalam memanfaatkan BBM subsidi untuk melaut menjadi salah satu fokus utama dalam analisis.

Teknik analisis data melibatkan tahapan sistematis seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, disederhanakan untuk relevansi, dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram untuk mempermudah analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui verifikasi yang ketat untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan.

Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan pemerintah, laporan pelaksanaan subsidi, data statistik nelayan, dan feedback dari masyarakat. Data ini digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan subsidi BBM diimplementasikan dan dampaknya terhadap nelayan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Bagi Nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara

Subsidi BBM untuk nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara masih menghadapi kendala, terutama dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kurangnya sosialisasi terkait jadwal penyaluran BBM bersubsidi menjadi tantangan utama. Selain itu, nelayan diwajibkan memiliki surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kendala lain mencakup kekurangan kuota BBM di SPBN Ratatotok, meskipun surat rekomendasi sudah dipermudah oleh dinas terkait. Pengelolaan dan penyaluran BBM di SPBN ini juga sering diwarnai dengan ketidakpastian, mengakibatkan nelayan harus menyesuaikan aktivitas melaut.

Ketepatan sasaran subsidi BBM menjadi isu penting yang memengaruhi penurunan kuota BBM bersubsidi. Laporan masyarakat sering menyebutkan adanya oknum yang tidak berhak menerima BBM bersubsidi. Hal ini menyebabkan pengawasan dari pemerintah daerah dan pihak berwenang menjadi lebih ketat. Namun, masih ada kekhawatiran bahwa bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran, sehingga pengawasan terhadap penerima subsidi perlu ditingkatkan.

Ketersediaan kuota BBM bersubsidi menjadi perhatian, dengan kebutuhan nelayan sering kali melampaui alokasi yang diberikan. Pihak pemerintah kabupaten berusaha mengatasi kekurangan ini dengan langkah-langkah seperti meminta tambahan kuota melalui pemerintah provinsi dan membagi BBM secara proporsional kepada nelayan. Selain itu, terdapat inisiatif pemberian BBM bersubsidi gratis dari anggaran pemerintah daerah sebagai solusi sementara untuk mendukung operasional nelayan.

Keberadaan SPBN di Kabupaten Minahasa Tenggara juga menjadi sorotan. Hanya satu dari dua SPBN yang ada, yaitu SPBN Ratatotok, yang beroperasi, sementara SPBN Belang masih terkendala perizinan. Akibatnya, SPBN Ratatotok harus melayani semua kebutuhan BBM bersubsidi di wilayah tersebut, menyebabkan antrean panjang dan keterbatasan pasokan bagi nelayan. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan kendala perizinan untuk mengaktifkan SPBN Belang.

Masalah ketersediaan BBM bersubsidi dan infrastruktur pendukung seperti SPBN berdampak pada produktivitas nelayan. Kendala ini tidak hanya memengaruhi kelangsungan pekerjaan nelayan tetapi juga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir. Harapannya, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan, memperbaiki distribusi kuota, dan memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung agar subsidi BBM benar-benar tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan nelayan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait BBM bersubsidi bagi nelayan

Distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara menghadapi kendala, terutama terkait keterlambatan pasokan dan ketidaktepatan sasaran. Keterlambatan distribusi dari Pertamina menyebabkan antrean panjang di SPBN Ratatotok, meskipun kuota yang dialokasikan terpenuhi secara bertahap. Selain itu, persoalan pengelolaan SPBN Belang yang belum beroperasi akibat kendala perizinan juga menunjukkan kurang optimalnya perhatian pemerintah terhadap kelancaran distribusi BBM bersubsidi. Nelayan mengeluhkan kualitas BBM yang terkadang tidak sesuai standar dan ketidaksesuaian jumlah subsidi dengan kebutuhan, terutama saat permintaan meningkat.

Keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan nelayan dinilai masih memerlukan perbaikan. Meski ada upaya memperbaiki sistem rekomendasi, seperti kemudahan pengurusan surat rekomendasi di berbagai lokasi, nelayan tetap mengharapkan respons yang lebih cepat dan efektif dari pemerintah untuk mengatasi masalah distribusi. Mereka berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib nelayan, termasuk memastikan jumlah BBM bersubsidi yang memadai sesuai kebutuhan operasional mereka.

Pengawasan pemerintah daerah terhadap distribusi BBM bersubsidi juga masih lemah, terlihat dari masih adanya kasus penyalahgunaan subsidi oleh kelompok non-prioritas. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung menjadi kendala utama dalam melakukan pemantauan yang efektif. Meskipun pengawasan dilakukan melalui laporan bulanan dan sidak mendadak oleh Pertamina dan instansi terkait, mekanisme pendataan dan distribusi yang kurang transparan terus menjadi masalah. Penyimpangan seperti penimbunan BBM dan penggunaan surat rekomendasi palsu juga masih terjadi.

Tanggung jawab pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi tidak sepenuhnya berada di Dinas Kelautan dan Perikanan, tetapi melibatkan dinas lain seperti Perindustrian dan Perdagangan. Meski begitu, Dinas Kelautan dan Perikanan tetap melakukan pemantauan melalui penyuluh lapangan yang memastikan subsidi digunakan sesuai peruntukannya. Jika ditemukan pelanggaran, langkah tegas seperti pembekuan akses subsidi akan diambil. Namun, diperlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi untuk memastikan pengawasan berjalan lebih efektif.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Minahasa Tenggara menghadapi kendala pada pelaksanaan SOP yang belum optimal. Kurangnya informasi, belum jelasnya mekanisme, dan adanya pembelian tanpa Surat Rekomendasi menunjukkan bahwa SOP belum diterapkan sesuai aturan yang berlaku. Padahal, peraturan mengharuskan nelayan memiliki Surat Rekomendasi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. SOP berfungsi sebagai pedoman agar kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien, namun implementasinya masih membutuhkan perbaikan.

Masih terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BBM bersubsidi, seperti pemberian kepada pihak yang tidak berhak. KUSUKA sebagai mekanisme verifikasi sudah cukup membantu, tetapi pelaksanaannya perlu penyempurnaan untuk memastikan subsidi diterima oleh nelayan kecil yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan dan evaluasi agar ketepatan sasaran lebih terjamin, sehingga subsidi dapat memberikan manfaat maksimal bagi nelayan.

Keterbatasan kuota BBM bersubsidi menjadi kendala utama yang dihadapi nelayan. Permintaan yang tinggi tidak sebanding dengan alokasi yang tersedia, sehingga sering terjadi antrean panjang dan pembelian sistem gilir. Nelayan kecil terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih mahal. Pemerintah perlu memastikan alokasi kuota yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nelayan, mengingat pentingnya BBM bersubsidi dalam menunjang aktivitas ekonomi mereka.

Hanya satu SPBN yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga akses nelayan terhadap BBM bersubsidi menjadi terbatas. Kurangnya infrastruktur ini meningkatkan biaya operasional nelayan, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari SPBN. Ketersediaan SPBN yang memadai sangat penting untuk mendukung distribusi BBM bersubsidi secara efektif dan efisien, serta mengurangi ketergantungan pada satu fasilitas.

Penambahan SPBN menjadi solusi yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap BBM bersubsidi. Infrastruktur publik yang memadai tidak hanya menunjang aktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memperbaiki dan menambah fasilitas untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lancar dan merata.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan subsidi BBM berjalan efektif. Hal ini mencakup pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan akses nelayan terhadap BBM bersubsidi, sehingga kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan keberlanjutan usaha nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Keberpihakan pemerintah terhadap nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam implementasi kebijakan BBM bersubsidi dinilai masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan kuota BBM bersubsidi yang sering dikeluhkan nelayan, serta minimnya infrastruktur SPBN, di mana dari dua SPBN yang ada hanya satu yang beroperasi. Padahal, kebijakan ini telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan, seperti UU No. 7 Tahun 2016 dan Perpres No. 191 Tahun 2014, yang mengharuskan subsidi BBM bagi nelayan diberikan dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Kurangnya koordinasi dan pengalokasian sumber daya menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini.

Kurangnya komunikasi yang efektif antarinstansi pemerintah mengakibatkan informasi terkait kebijakan tidak tersampaikan dengan jelas kepada pelaksana maupun nelayan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan juga menjadi kendala dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar. Disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan sering kali kurang memadai, sehingga mekanisme pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yang akhirnya berdampak pada kurangnya keadilan dan efektivitas kebijakan.

Pengawasan pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan BBM bersubsidi masih lemah. Distribusi BBM bersubsidi sering tidak tepat sasaran, dengan alokasi yang terkadang diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Selain itu, kekurangan kuota dan minimnya SPBN beroperasi menjadi hambatan utama. Meski pengawasan merupakan elemen krusial dalam implementasi kebijakan, mekanisme pengawasan yang ada saat ini belum mampu memastikan alokasi BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan nelayan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman terkait SOP penyaluran, ketidaktepatan sasaran dengan masih adanya konsumen tanpa surat rekomendasi, kuota BBM yang belum mencukupi kebutuhan nelayan, serta minimnya ketersediaan SPBN yang memadai. Faktor lain yang menjadi kendala adalah rendahnya keberpihakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ini dan belum optimalnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.

Pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi SOP penyaluran BBM kepada nelayan dan petugas penyalur untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas. Sistem verifikasi berbasis teknologi, seperti aplikasi atau sistem pendaftaran online, harus diterapkan guna memastikan hanya konsumen berhak yang dapat membeli BBM bersubsidi. Selain itu, kuota BBM bersubsidi harus disesuaikan dengan kebutuhan nelayan yang terus berkembang, serta memastikan operasionalisasi penuh dari dua SPBN yang tersedia atau membangun SPBN baru di lokasi strategis.

Pemerintah daerah harus meningkatkan keberpihakan dengan melakukan analisis kebutuhan kuota BBM secara mendalam dan penyesuaian kuota secara berkala, disertai dialog terbuka dengan nelayan. Langkah ini penting untuk memastikan alokasi BBM sesuai kebutuhan dan mendukung operasional nelayan secara optimal.

Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Mekanisme pengawasan harus mencakup sistem pelaporan yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan penyelewengan, sehingga kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan, cinta, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program RPL S2 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Manado, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, pengelola program RPL, dosen pembimbing, dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para narasumber, sahabat, teman seperjuangan, serta semua pihak yang telah membantu, termasuk keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, suami, dan anak-anak yang memberikan semangat serta doa tiada henti.

Semoga segala bantuan, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis memohon maaf atas kekurangan dalam penyusunan tesis ini dan berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Carvalho and J. Guillen, "Economic Impact of Eliminating the Fuel Tax Exemption in the EU Fishing Fleet," *Sustainability*, vol. 13, no. 5, p. 2719, Mar. 2021, doi: 10.3390/su13052719.
- [2] A. S. Hidayat, I. Rajiani, and D. Arisanty, "Sustainability of Floodplain Wetland Fisheries of Rural Indonesia: Does Culture Enhance Livelihood Resilience?," *Sustainability*, vol. 14, no. 21, p. 14461, Nov. 2022, doi: 10.3390/su142114461.
- [3] K. Lancker, A.-L. Deppenmeier, T. Demissie, and J. O. Schmidt, "Climate change adaptation and the role of fuel subsidies: An empirical bio-economic modeling study for an artisanal open-access fishery," *PLoS One*, vol. 14, no. 8, p. e0220433, Aug. 2019, doi: 10.1371/journal.pone.0220433.
- [4] N. Stacey *et al.*, "Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities," *Mar. Policy*, vol. 132, p. 104654, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.marpol.2021.104654.
- [5] C. Warren and D. J. Steenbergen, "Fisheries decline, local livelihoods and conflicted governance: An Indonesian case," *Ocean Coast. Manag.*, vol. 202, p. 105498, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.ocecoaman.2020.105498.
- [6] A. Schuhbauer, D. J. Skerritt, N. Ebrahim, F. Le Manach, and U. R. Sumaila, "The Global Fisheries Subsidies Divide Between Small- and Large-Scale Fisheries," *Front. Mar. Sci.*, vol. 7, Sep. 2020, doi: 10.3389/fmars.2020.539214.
- [7] A. N. Bahasoan and Z. Hadi, "On the Performance of Civil Servants at Marine and Fishery Service Office Majene District," *ProBisnis J. Manaj.*, vol. 14, no. 2, pp. 268–275, 2023, doi: <https://doi.org/10.62398/probis.v14i2.90>.
- [8] L. Formenti, "Assessing transparency in fisheries subsidies: A notification-driven analysis," *Mar. Policy*, vol. 136, p. 104152, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.marpol.2020.104152.
- [9] K. Wang, M. N. Reimer, and J. E. Wilen, "Fisheries subsidies reform in China," *Proc. Natl. Acad. Sci.*, vol. 120, no. 26, Jun. 2023, doi: 10.1073/pnas.2300688120.
- [10] J. Lee, "Subsidies for Illegal Activities?—Reframing IUU Fishing from the Law Enforcement Perspective," *J. Int. Econ. Law*, vol. 22, no. 3, pp. 417–438, Sep. 2019, doi: 10.1093/jiel/jgz017.
- [11] J. Ananthapavan, G. Sacks, M. Moodie, P. Nguyen, and R. Carter, "Preventive health resource allocation decision-making processes and the use of economic evidence in an Australian state government—A mixed methods study," *PLoS One*, vol. 17, no. 9, p. e0274869, Sep. 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0274869.
- [12] S. S. Thesari, F. Trojan, and D. R. Batistus, "A decision model for municipal resources management," *Manag. Decis.*, vol. 57, no. 11, pp. 3015–3034, Nov. 2019, doi: 10.1108/MD-05-2017-0500.
- [13] M. I. R. Rantung, S. V Tarore, E. Posumah, P. Ilmu, A. Negara, and U. N. Manado,

- "KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA," *J. Adm. Publik dan Kebijak.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–8, Dec. 2023, doi: 10.30596/japk.v3i2.17246.
- [14] E. Barbosa, A. Gonçalves, M. Guerra, and C. Cruz, "A systematic review on resource allocation in public health," *Eur. J. Public Health*, vol. 30, no. Supplement_5, Sep. 2020, doi: 10.1093/eurpub/ckaa166.1309.
- [15] M. Çağlar and S. Gürel, "Impact assessment based sectoral balancing in public R&D project portfolio selection," *Socioecon. Plann. Sci.*, vol. 66, pp. 68–81, Jun. 2019, doi: 10.1016/j.seps.2018.07.001.
- [16] S. Walker, S. Griffin, M. Asaria, A. Tsuchiya, and M. Sculpher, "Striving for a Societal Perspective: A Framework for Economic Evaluations When Costs and Effects Fall on Multiple Sectors and Decision Makers," *Appl. Health Econ. Health Policy*, vol. 17, no. 5, pp. 577–590, Oct. 2019, doi: 10.1007/s40258-019-00481-8.
- [17] G. H. Tumbel, D. S. R. Siwij, M. I. R. Rantung, E. H. Polii, and F. Mokodompit, "Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency," Atlantis Press SARL, 2023, pp. 1985–1993. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0_238.
- [18] Muhammad Mukhram, Nurjannah, and Wulan Ayuandiani, "Analysis of Perceptions and Interests of Accounting Students in Choosing A Profession in the Field of Taxation (Case Study of Tax Concentration at University West Sulawesi)," *Manag. J. Manag. Adm. Sci.*, vol. 1, no. 3, pp. 82–87, Jun. 2023, doi: 10.58738/manager.v1i3.285.
- [19] E. M. Luxon, "What do advocates know about policymaking? Revealing process in the Advocacy Coalition Framework," *J. Eur. Public Policy*, vol. 26, no. 1, pp. 106–125, Jan. 2019, doi: 10.1080/13501763.2017.1400088.
- [20] V. Ridde, D. Pérez, and E. Robert, "Using implementation science theories and frameworks in global health," *BMJ Glob. Heal.*, vol. 5, no. 4, p. e002269, Apr. 2020, doi: 10.1136/bmjgh-2019-002269.
- [21] X. Fernández-i-Marín, M. Hinterleitner, C. Knill, and Y. Steinebach, "Policy growth, implementation capacities, and the effect on policy performance," *Governance*, vol. 37, no. 3, pp. 927–945, Jul. 2024, doi: 10.1111/gove.12816.
- [22] S. Fan, T. Zhang, and M. Li, "The credibility and bargaining during the process of policy implementation—a case study of China's prohibition of open burning of crop straw policy," *J. Chinese Gov.*, vol. 6, no. 2, pp. 283–306, Apr. 2021, doi: 10.1080/23812346.2020.1765453.
- [23] T. Pan and B. Fan, "How does policy attention affect e-government performance? The role of resource allocation and public–private collaboration," *Int. Rev. Adm. Sci.*, vol. 90, no. 2, pp. 369–384, Jun. 2024, doi: 10.1177/00208523231185531.
- [24] C. Knill, C. Steinbacher, and Y. Steinebach, "Balancing Trade-Offs between Policy Responsiveness and Effectiveness: The Impact of Vertical Policy-Process Integration on Policy Accumulation," *Public Adm. Rev.*, vol. 81, no. 1, pp. 157–160, Jan. 2021, doi: 10.1111/puar.13274.
- [25] L. Chen, X. Yuan, G. Zhang, Q. Guo, W. Liu, and S. Zhang, "The Study for Public Management Policy Utility Evaluation and Optimization System under the Framework of Social Computing Perspective," *IEEE Intell. Syst.*, pp. 1–1, 2020, doi: 10.1109/MIS.2020.2971951.

- [26] E. Wintergalen, R. Oyanedel, J. C. Villaseñor-Derbez, S. Fulton, and R. Molina, "Opportunities and challenges for livelihood resilience in urban and rural Mexican small-scale fisheries," *Ecol. Soc.*, vol. 27, no. 3, p. art46, 2022, doi: 10.5751/ES-13471-270346.
- [27] I. Chapsos, J. Koning, and M. Noortmann, "Involving local fishing communities in policy making: Addressing Illegal fishing in Indonesia," *Mar. Policy*, vol. 109, p. 103708, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.marpol.2019.103708.
- [28] S. Villasante *et al.*, "Resilience and Social Adaptation to Climate Change Impacts in Small-Scale Fisheries," *Front. Mar. Sci.*, vol. 9, May 2022, doi: 10.3389/fmars.2022.802762.
- [29] D. S. R. Siwij, A. R. Dilapanga, and E. H. Polii, "Transparansi dalam Tata Kelola Perusahaan Air Minum Daerah di Kabupaten Minahasa," *Acad. Educ. J.*, vol. 15, no. 1, pp. 495–504, Jan. 2024, doi: 10.47200/aoej.v15i1.2233.
- [30] E. Aceves-Bueno, A. J. Read, and M. A. Cisneros-Mata, "Illegal fisheries, environmental crime, and the conservation of marine resources," *Conserv. Biol.*, vol. 35, no. 4, pp. 1120–1129, Aug. 2021, doi: 10.1111/cobi.13674.
- [31] I. Imbwae, S. Aswani, and W. Sauer, "Socio-Economic and Environmental Challenges of Small-Scale Fisheries: Prognosis for Sustainable Fisheries Management in Lake Kariba, Zambia," *Sustainability*, vol. 15, no. 4, p. 3179, Feb. 2023, doi: 10.3390/su15043179.
- [32] X. Yang, W. Liu, W. Liu, and D. Tao, "A Survey on Canonical Correlation Analysis," *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, vol. 33, no. 6, pp. 2349–2368, Jun. 2021, doi: 10.1109/TKDE.2019.2958342.
- [33] P. Ray, S. S. Reddy, and T. Banerjee, "Various dimension reduction techniques for high dimensional data analysis: a review," *Artif. Intell. Rev.*, vol. 54, no. 5, pp. 3473–3515, Jun. 2021, doi: 10.1007/s10462-020-09928-0.
- [34] M. Ashraf *et al.*, "A Survey on Dimensionality Reduction Techniques for Time-Series Data," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 42909–42923, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3269693.
- [35] M. Espadoto, R. M. Martins, A. Kerren, N. S. T. Hirata, and A. C. Telea, "Toward a Quantitative Survey of Dimension Reduction Techniques," *IEEE Trans. Vis. Comput. Graph.*, vol. 27, no. 3, pp. 2153–2173, Mar. 2021, doi: 10.1109/TVCG.2019.2944182.
- [36] C. I. de Campos, C. S. Pitombo, P. Delhomme, and J. A. Quintanilha, "Comparative analysis of data reduction techniques for questionnaire validation using self-reported driver behaviors," *J. Safety Res.*, vol. 73, pp. 133–142, Jun. 2020, doi: 10.1016/j.jsr.2020.02.004.
- [37] S. Ayesha, M. K. Hanif, and R. Talib, "Overview and comparative study of dimensionality reduction techniques for high dimensional data," *Inf. Fusion*, vol. 59, pp. 44–58, Jul. 2020, doi: 10.1016/j.inffus.2020.01.005.